

(Studi Kasus: Kabupaten Maluku Tenggara Barat)

Septiana Dewi¹, Aditianata¹,

¹Jurusan Teknik Planologi, Universitas Esa Unggul

Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510

Septiana.dewi52@yahoo.com

Abstrak

Pada Penelitian ini membahas tentang pengembangan ekonomi kelautan dalam meningkatkan perekonomian di wilayah kepulauan Indonesia Bagian Timur yaitu, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Serta mengkaitkan antar wilayah pendukung seperti: pulau-pulau kecil di sekelilingnya dan menjadikan beranda terdepan di wilayah ini. Dalam startegi meningkatkan ekonomi kelautan perlu terlebih dahulu mengetahui perkembangan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di dalam PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan perbandingan PDRB terhadap Provinsi Maluku. Untuk melihat hasilnya menggunakan analisis shift share dan keterkaitan antar wilayah menggunakan analisis konektivitas. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara kualitatif dengan kuantitatif yaitu wawancara. Hasil dari penelitian ini mengetahui sektor ekonomi kelautan, mengetahui aktivitas pengelolaan dan keterkaitan antar wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Kata Kunci : Analisis Shift Share, Ekonomi Kelautan (Perikanan Tangkap dan Budidaya Rumput Laut), Konektivitas, Value Chain, Pengembangan Wilayah.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Maritim yang memiliki luas wilayah laut seluas 6.315.222 km² dengan angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar didunia dan diakui secara internasional yang ditetapkan dalam *UNCLOS 1982* yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketetapan yang mengikutinya. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di ZEE serta landas kontinen Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan *natural reseources* di laut bebas dan di dasar samudera. Selaras dengan hak atas pengelolaan wilayah lautnya yang luas, Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang besar, potensi ekonomi kelautan tersebut tersebar pada seluruh wilayah laut seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari wilayah territorial sebesar 3,2 juta km² dan wilayah *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)* 2,7 juta km².

Potensi Indonesia dengan berbagai hasil lautnya, mulai dari perikanan yang termasuk perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan sebesar US\$31.935.651.400/tahun. Komoditas perikanan dengan nilai komersial tinggi di Indonesia adalah udang, ikan tuna, cumi-cumi dan rumput laut. Namun pada kenyataannya pengelolaan sumberdaya pada sektor perikanan dan kelautan nasional masih belum dimanfaatkan secara optimal, berdasarkan data PNBPN (Penerima Negara Bukan Pajak) dari sektor perikanan dalam kurun lima tahun terakhir, hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional. Dari nilai produksi perikanan laut di 2011, 2012, dan 2013 masing-masing sebesar Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun. Namun faktanya, PNBPN (Penerima Negara Bukan Pajak) sumberdaya perikanan tidak sebesar nilai produksi ikan laut seperti terdata di atas, pada 2011, 2012, dan 2013. PNBPN (Penerima Negara Bukan Pajak) sumberdaya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp229 miliar, kemudian 0,3

persen atau Rp215 miliar dan 0,29 persen atau sebesar Rp183 miliar. Hal ini menyebabkan masyarakat pesisir yang merupakan masyarakat paling dekat dengan sumberdaya pesisir dan laut umumnya masih tergolong pada masyarakat miskin atau dikategorikan sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pembangunan dalam pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, berdasarkan data dari system informasi statistik pembangunan daerah tertinggal milik Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) disebutkan bahwa jika dilihat dari kondisi geografisnya, maka dari 183 kabupaten yang tertinggal di seluruh Indonesia sekitar 50% merupakan kabupaten pesisir dan kepulauan, seperti Kepulauan Sula (Maluku Utara), Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau), Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara), Kepulauan Aru (Maluku), Raja Ampat (Papua Barat), dan sebagainya. Fakta diatas menunjukkan bahwa wilayah pesisir, dan kepulauan merupakan kawasan tertinggal, dan termiskin. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pembangunan dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan wilayah daratan.

Indonesia sebagai negara *Maritime* yang terdiri dari pulau-pulau kecil maupun pulau besar, dengan jumlah pulau lebih dari 13.500 pulau dan mencakup wilayah sepanjang 3.000 mil laut, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera. Maka Dalam konteks geoekonomi, Indonesia sebagai *archipelagic state* harus mampu menempatkan dirinya di lingkungan strategis dengan memperkuat konektivitas lautnya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Luas permukaan wilayah kedaulatan nasional NKRI kini bahkan lebih banyak terdiri atas air (75 persen) ketimbang daratan. Sungguh mengherankan mengapa fakta dan aset tersebut hingga kini tidak diakui secara eksplisit oleh para pemangku kebijakan negeri untuk membentuk suatu strategi perekonomian nasional berbasis kemaritiman yang komprehensif bagi arsipelago Indonesia.

Kondisi konektivitas laut nasional berdasarkan *Global Competitiveness Index* tahun 2014 menunjukkan peringkat konektivitas Indonesia pada angka 77. Angka tersebut masih kalah dengan indeks konektivitas Malaysia dan Thailand. Selain itu, *Sea Transport Connectivity Index* menunjukkan Indonesia masih memiliki kesenjangan konektivitas logistik yang cukup

tinggi di beberapa daerah. Kesenjangan sangat terlihat di kawasan Indonesia Timur.

Maluku Tenggara Barat memiliki luas keseluruhan 52.995,19 km², wilayah ini terdiri dari 10 kecamatan dan merupakan daerah kepulauan yang wilayahnya didominasi perairan seluas ± 42.892,28 km² (80,94%) . Mengingat luas wilayah lautnya yang besar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya ikan dan non ikan yang potensial untuk dikembangkan, seperti perikanan tangkap dan rumput laut. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya produksi dan nilai perikanan tangkap di Maluku Tenggara Barat mencapai 8.570,56 (ton) jika dalam nilai rupiah mencapai 111,41 (milyar rupiah) sedangkan untuk komoditi rumput laut memiliki 2 produksi yaitu: produksi rumput laut kering dan rumput laut basah. Maka dari hasil produksi rumput laut kering mencapai 2,513.70 (ton) atau senilai 25,137,025 (milyar rupiah) sedangkan produksi rumput laut basah mencapai 20,109.62 (ton) atau senilai 100,548,100 (milyar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan potensi laut tiap tahunnya baik itu komoditi rumput laut dengan perikanan tangkap sangat melimpah.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan harga berlaku pada tahun 2008 hingga 2012, terjadi kenaikan Produksi Domestik Regional Bruto Kabupaten Maluku Tenggara Barat rata-rata sebesar 13,74%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2011-2012 dimana peningkatan PDRB mencapai 18%. Namun demikian, kontribusi PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap Provinsi Maluku Tenggara Barat rata-rata hanya sebesar 6,61%.

Berdasarkan data perkembangan beberapa Pendapatan Regional Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Atas Dasar Harga Berlaku yang ada, dalam tiga tahun 2009 - 2013 sektor pertanian, sektor perdagangan hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB. Sektor Pertanian merupakan sektor yang menyumbang PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertinggi namun kontribusinya cenderung menurun sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa memiliki kecenderungan peningkatan. Sektor Pertanian, memberikan sumbangan pada PDRB Tahun 2009 sebesar 56.28 persen, pada tahun 2010 sebesar 54.18 persen serta pada tahun 2011 sebesar 52,12 persen. Kontribusi terbesar pada sektor ini berasal

dari Sub Sektor Perikanan yang tahun 2011 mampu menyumbang sebesar 26,25 persen. Sementara sektor lain yang menduduki peringkat kedua adalah Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran dalam pembentukan PDRB.

Sektor ini berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang jasa. Pada tahun 2009 besar sumbangan sektor ini sebesar 23,57 %, tahun 2010 meningkat lagi menjadi 24,40 % sedangkan tahun 2011 menjadi 25,03 %. Sektor ketiga penyumbang terbesar yaitu sektor Jasa-Jasa dengan menyumbang sebesar 10,85 % tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 mengalami kenaikan, dengan besar sumbangan sebesar 11,36 %, dan pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi 12,73 %. Pada tahun 2012 pertanian masih merupakan penyumbang PDRB terbesar yakni 376.116 dan meningkat kembali di tahun 2013 menjadi 425.124. secara keseluruhan kenaikan dari tahun 2012 ke 2013 adalah sebesar 11,95 persen.

Akan tetapi berdasarkan dari hasil potensi dan pertumbuhan ekonomi yang dimiliki tidak sebanding dengan hasil yang di dapat karena

Metode Penelitian

Penelitian terhadap analisis keterkaitan wilayah dalam pengembangan ekonomi kelautan di wilayah kepulauan (studi kasus: Kabupaten Maluku Tenggara Barat) ini menggunakan pendekatan kualitatif kuantitatif dengan metode kombinasi. Melalui metode kombinasi analisis, gambaran kejadian yang berlangsung selama penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainya akan direkam serta dituangkan dalam bentuk naratif. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode kombinasi analisis.

Selanjutnya alat yang dipakai dalam analisis data pada penelitian ini adalah Analisis *Shift Share*. Analisis ini digunakan untuk melihat sektor-sektor ekonomi terutama sektor ekonomi kelautan yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menggunakan data PDRB Kabupaten kemudian dibandingkan dengan PDRB Provinsi. sehingga akan terlihat sektor mana yang pertumbuhannya progresif dan lamban.

Shift Share adalah salah satu alat untuk mengidentifikasi sumber ekonomi dari sisi tenaga

potensi yang terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini belum dikelola secara komprehensif dan terpadu. dikarenakan pengelolaan kegiatan dilakukan secara parsial swasta (dunia usaha). Hal ini ditinjau dari setiap masing-masing kecamatan bahwa hasil potensi hanya dijual pada kalangan pengepul dan masyarakat sekitar dengan harga yang tidak relavan. Hal ini dikarenakan tidak adanya konektivitas antar wilayah, sehingga menyebabkan terjadinya perlambatan pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Atas dasar inilah perlu adanya kajian mengenai Analisis Keterkaitan Wilayah Dalam Pengembangan Ekonomi Kelautan Di Wilayah Kepulauan (Studi Kasus: Kabupaten Maluku Tenggara Barat) peneliti tertarik untuk menggunakan pendekatan analisis *Shift Share* dan Analisis Konektivitas. Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah : (1) Mengidentifikasi sektor ekonomi kelautan di wilayah penelitian, (2) Merumuskan keterkaitan antar wilayah sebagai bahan masukan pengembangan ekonomi kelautan di wilayah penelitian.

kerja atau pendapatan suatu wilayah tertentu. Analisis ini menggunakan dua titik periode data missal untuk menganalisis dari segi pendapatan daerah kita dapat mengambil PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2010 dan 2014. *Shift Share* ini berguna untuk melihat perkembangan wilayah terhadap wilayah yang lebih luas missal perkembangan kabupaten terhadap provinsi atau provinsi terhadap nasional. Dengan *Shift Share* dapat diketahui perkembangan sektor-sektor disbanding sektor lainnya serta dapat membandingkan laju perekonomian disuatu wilayah, Menurut Glasson, John. (1974).

Analisis Konektivitas (*Value Chain*) Konsep ini digunakan untuk melihat sistem pengelolaan dalam bentukbarang setengah jadi dan barang jadi yang kemudian dirumuskan menggunakan alur sistem pendiristribusian. Dimana Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki target untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kelautan yang memiliki aktivitas-aktivitas utama dengan lima kategori utama yang diperlukan dalam bersaing dari hasil potensi sumber daya laut dengan strategi dalam pengembangan ekonomi kelautan diwilayah ini:

a). *Inbound Logistics*

Aktivitas yang berhubungan penerimaan, penyimpanan, dan penyebaran masuk ke produk, seperti: hasil nelayan dari penangkapan

perikanan tangkap dan panen budidaya rumput laut.

b). *Operation*

Hasil perikanan tangkap dan budidaya rumput laut diolah untuk dijadikan suatu produk jadi dalam kemasan menggunakan teknologi mesin.

c). *Outbound Logistics*

Aktivitas yang berkaitan dengan hasil perikanan tangkap dan budidaya rumput laut, dimana hasil potensi laut dimasukan kedalam *Cold Storage* untuk penyimpanan sehingga kualitasnya dapat terjaga. Serta membawa ke suatu tempat pengelolaan untuk dijadikan barang jadi dan kemudian di distribusikan kepada pembeli.

d). *Marketing and Sales*

Aktivitas yang berhubungan dengan integrasi dengan sistem informasi untuk mempermudah dalam seleksi penyalur serta hubungan penyalur terhadap konsumen.

e). *Service*

Dalam sistem pengelolaan hasil potensi laut membutuhkan aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan jasa untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai produk, seperti: memberikan pelatihan terhadap masyarakat dalam pengelolaan hasil laut untuk dijadikan produk jadi.

Struktur pengelolaan hasil potensi laut seperti: Perikanan Tangkap dan Budidaya Rumput Laut dapat dibedakan sesuai dengan jenisnya.

Value Chain merupakan kumpulan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, menyerahkan, dan mendukung produk, Menurut *Michael E Porter; Competitive Strategy (1994)*. Definisi *Value Chain* diatas juga dikemukakan oleh *Shank dan Govindarajan (1993)*, *Value Chain* merupakan suatu strategi untuk mencapai keuntungan dengan mengevaluasi dan memanfaatkan setiap aktivitas untuk mencapai hasil yang baik. *Value Chain* di perusahaan dalam bisnis apa saja merupakan aktivitas pembentukan nilai yang saling berhubungan dimulai dari sumber material dasar oleh pemasok sampai produk tersebut berada di tangan konsumen.

Network Analysis adalah metode untuk menyusun suatu perencanaan dan mengendalikan suatu kegiatan. Metode ini merupakan model yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas-aktivitas untuk emnghasilkan suatu barang.

Tabel 1.

Analisis Shift Share PDRB Atas Dasar Harga Konsan 2010 Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Provinsi Maluku Tahun 2010-2014

Lapangan Usaha / <i>Industrial Origin</i>	Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010		Provinsi Maluku (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010		KPN	KPP	KPK	PN
	2010 (Yio)	2014 (Yit)	2010 (Yo)	2014 (Yit)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
- Pertanian, Peternakan	171.674	197.050	2.144.644	2.509.074	0,28	(0,11)	(0,02)	(0,13)
- Kehutanan	8.591	9.226	110.238	122.90	0,28	(0,16)	(0,04)	(0,21)
1 - Perikanan	46.611	57.411	2.570.834	3.223.58	0,28	(0,03)	(0,02)	(0,05)
2 Pertanian dan Penggalian	15.545	21.014	579.505,67	819.216,23	0,28	0,13	(0,06)	0,07
3 Industri Pengolahan	14.691	18.961	1.011.029,47	1.286.060,97	0,28	(0,01)	0,02	0,01

Lapangan Usaha / Industrial Origin	Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010		Provinsi Maluku (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010		KPN	KPP	KPK	PN
	2010 (Yio)	2014 (Yit)	2010 (Yo)	2014 (Yit)	$(\Sigma Yt/\Sigma Y-1)$	$(Yt/Yo) - (\Sigma Yt/\Sigma Yo)$	$(Yit/Yio) - (Yt/Yo)$	KPP + KPK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4 Pengadaan Listrik dan Gas	507	790	15.124,42	24.580,20	0,28	0,35	(0,07)	0,28
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.374	10.193	100.367,16	118.821,79	0,28	(0,10)	0,03	(0,06)
6 Kontruksi	132.898	183.607	1.196.024,96	1.622.354,35	0,28	0,08	0,03	0,10
7 Perdagangan Besar dan Eceran	88.721	118.835	2.545.900,66	3.316.632,98	0,28	0,02	0,04	0,06
8 Transportasi dan Perdagangan	30.212	39.363	987.897,27	1.296.092,97	0,28	0,03	(0,01)	0,02
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.421	23.866	326.551,74	423.516,77	0,28	0,02	(0,00)	0,02
10 Informasi dan Komunikasi	24.122	32.886	663.238,36	899.970,34	0,28	0,08	0,01	0,08
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	23.941	41.160	567.869,45	875.094,76	0,28	0,26	0,18	0,44
12 Real Estat	3.245	3.775	71.430,50	84.689,6	0,28	(0,09)	(0,02)	(0,12)
13 Jasa Perusahaan	6.628	7.784	201.580,62	250.156,68	0,28	(0,04)	(0,07)	(0,11)
14 Administrasi	293.434	381.803	3.447.940,53	4.514.837,8	0,28	0,03	(0,01)	0,02
15 Jasa Pendidikan	37.764	46.821	1.060.763,37	1.272.532,3	0,28	(0,08)	0,04	(0,04)
16 Jasa Kesehatan dan	41.164	47.874	449.958,83	517.347,7	0,28	(0,13)	0,01	(0,12)
17 Jasa Lainnya	14.009	14.626	377.684,91	407.606,2	0,28	(0,20)	(0,04)	(0,24)
PDRB	980.552	1257045	18428585	23585069				
Presentase (%) Pertumbuhan PDRB		28,20		27,98				

Sumber: Hasil Analisis 2015

A. Komponen Pertumbuhan Nasional

KPN digunakan untuk menggambarkan hasil Pertumbuhan Nasional. Perhitungan KPN dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$KPN = (Y_t/Y_o)-1$$

Keterangan :

Y_t : Jumlah total PDRB Tingkat I di

Tahun akhir

Y_o : Jumlah total PDRB tingkat I di

Tahun awal

Berikut ini merupakan perhitungan KPN Maluku tahun 2010 dan 2014

$$KPN = (235.850,69/184.285,85) - 1 = 0,28$$

B. Komponen Pertumbuhan Proposional

KPP digunakan sebagai mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Perhitungan KPP dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Rumus yang digunakan sebagai perhitungan KPP adalah sebagai berikut :

$$KPP = \left(\frac{Y_{it}}{Y_{io}} - \frac{Y_t}{Y_o} \right)$$

Keterangan:

Y_{it} : PDRB Nasional/Regional sektor I di tahun akhir

Y_{io} : PDRB Nasional/Regional sektor I di tahun awal

Y_t : Jumlah total PDRB tingkat I di tahun akhir

Y_o : Jumlah total PDRB tingkat I di tahun akhir

Dalam perhitungan KPP terbagi dalam dua penilaian, yakni sebagai berikut.

- KPP <0, maka spesialisasi sektor yang secara nasional tumbuh lamban
- KPP >0, maka spesialisasi sektor yang secara nasional tumbuh cepat

Berikut ini merupakan **Tabel 2** dari hasil perhitungan KPP pada sektor kegiatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibawah ini:

Tabel 2.

Hasil Perhitungan KPP Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

	Lapangan Usaha / <i>Industrial Origin</i>	KPN	KPP	KETERANGAN
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Pertanian, Peternakan	0,28	-0,11	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Lamban
	- Kehutanan	0,28	-0,16	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Lamban
	- Perikanan	0,28	-0,03	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Lamban
2	Pertambangan dan Penggalian	0,28	0,13	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Prograsif

Lapangan Usaha / <i>Industrial Origin</i>		KPN	KPP	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)
3	Industri Pengolahan	0,28	-0,01	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Lamban
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,35	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Prograsif
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	-0,1	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Lamban
6	Kontruksi	0,28	0,08	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Prograsif
7	Perdagangan Besar dan Eceran	0,28	0,02	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Prograsif
8	Transportasi dan Perdagangan	0,28	0,03	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Prograsif
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,02	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Prograsif
10	Informasi dan Komunikasi	0,28	0,08	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Prograsif
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,28	0,26	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Prograsif
12	Real Estat	0,28	-0,09	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Lamban
13	Jasa Perusahaan	0,28	-0,04	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Lamban
14	Administrasi Pemerintahan	0,28	0,03	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Prograsif
15	Jasa Pendidikan	0,28	-0,08	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Lamban

Lapangan Usaha / <i>Industrial Origin</i>		KPN	KPP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,28	-0,13	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Lamban
17	Jasa Lainnya	0,28	-0,2	Spesialisasi dalam sektor yang secara Nasional tumbuh Lamban

Sumber: Hasil Analisis 2015

C. Komponen Pertumbuhan Daya Saing Kabupaten

KPK digunakan untuk melihat hasil pertumbuhan daya saing Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap Provinsi Maluku. Berikut perhitungan KPK dibawah ini;
Rumus yang digunakan sebagai perhitungan KPK adalah sebagai berikut.

$$KPK = \left(\frac{Y_{it}}{Y_{io}} - \frac{Y_{it}}{Y_{io}} \right)$$

Keterangan :

Yit : PDRB Lokal sektor I di tahun akhir

Yio : PDRB Lokal sektor I di tahun awal

Yit : Jumlah total PDRB tingkat I di tahun akhir

Yio : Jumlah total PDRB tingkat I di tahun awal

Dalam perhitungan KPK, terbagi dalam dua penilaian, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.

Hasil Perhitungan KPK Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Lapangan Usaha / <i>Industrial Origin</i>	KPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
- Pertanian, Peternakan	-0,02	Tidak Mempunyai Daya Bersaing
- Kehutanan	-0,04	Tidak Mempunyai Daya Bersaing
1 - Perikanan	-0,02	Tidak Mempunyai Daya Bersaing
2 Pertambangan dan Penggalian	-0,06	Tidak Mempunyai Daya Bersaing
3 Industri Pengolahan	0,02	Mempunyai Daya Bersaing
4 Pengadaan Listrik dan Gas	-0,07	Tidak Mempunyai Daya Bersaing
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	Mempunyai Daya Bersaing
6 Kontruksi	0,03	Mempunyai Daya Bersaing
7 Perdagangan Besar dan Eceran	0,04	Mempunyai Daya Bersaing
8 Transportasi dan Perdagangan	-0,01	Tidak Mempunyai Daya Bersaing

Lapangan Usaha / <i>Industrial Origin</i>		KPK	Keterangan
(1)		(2)	(3)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,00	Mempunyai Daya Bersaing
10	Informasi dan Komunikasi	0,01	Mempunyai Daya Bersaing
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,18	Mempunyai Daya Bersaing
12	Real Estat	(0,02)	Tidak Mempunyai Daya Bersaing
13	Jasa Perusahaan	(0,07)	Tidak Mempunyai Daya Bersaing
14	Administrasi Pemerintahan	(0,01)	Tidak Mempunyai Daya Bersaing Dapat Bersaing
15	Jasa Pendidikan	0,04	Mempunyai Daya Bersaing
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01	Mempunyai Daya Bersaing
17	Jasa Lainnya	(0,04)	Tidak Mempunyai Daya Bersaing

Sumber: Hasil Analisis 2015

Pergeseran Netto (PN) sebagai asumsi pertumbuhan sektor ekonomi kabupaten sama dengan pertumbuhan sektor ekonomi tingkat nasional (Provinsi), sebagai

wilayah perekonomian yang dijadikan sebagai acuan untuk melihat pertumbuhan sektor kelautan.

Tabel 4.

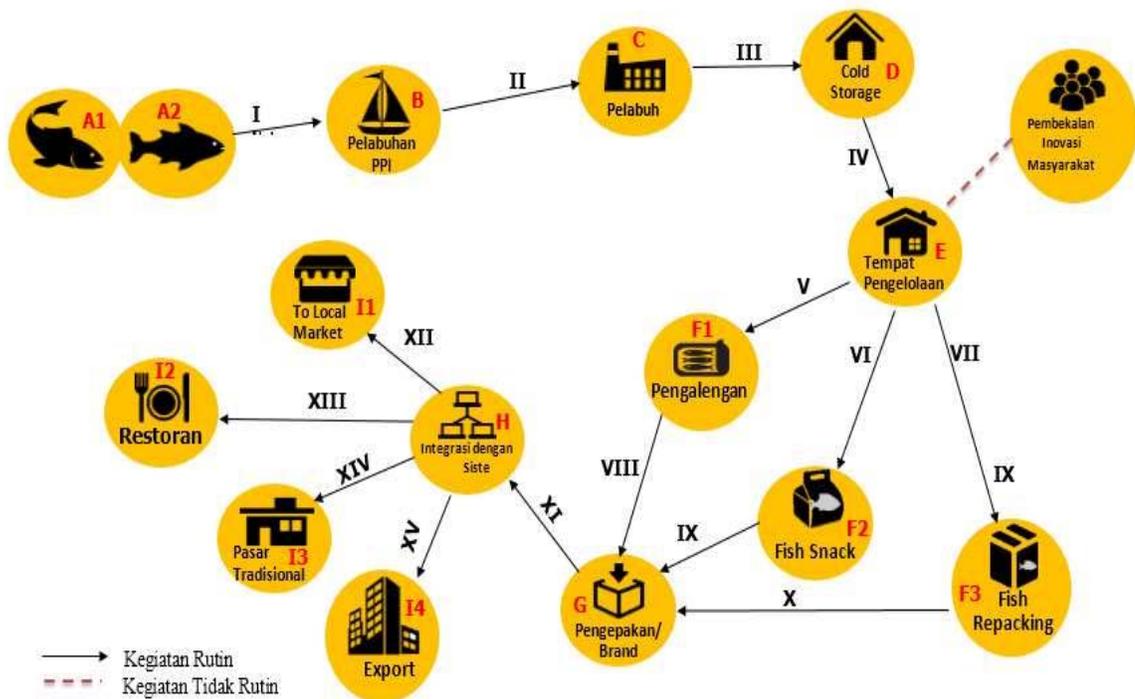
Hasil PN Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Lapangan Usaha / <i>Industrial Origin</i>		PN	Intrepretasi PN
(1)		(2)	(3)
1	- Pertanian, Peternakan	-0,13	Mundur
	- Kehutanan	-0,21	Mundur
	- Perikanan	-0,05	Mundur
2	Pertambangan dan Penggalian	0,07	Maju
3	Industri Pengolahan	0,01	Maju
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	Maju
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,06	Mundur
6	Konstruksi	0,10	Maju
7	Perdagangan Besar dan Eceran	0,06	Maju
8	Transportasi dan Perdagangan	0,02	Maju

	Lapangan Usaha / <i>Industrial Origin</i>	PN	Intrepretasi PN
	(1)	(2)	(3)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,02	Maju
10	Informasi dan Komunikasi	0,08	Maju
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,44	Maju
12	Real Estat	-0,12	Mundur
13	Jasa Perusahaan	-0,11	Mundur
14	Administrasi Pemerintahan	0,02	Maju
15	Jasa Pendidikan	-0,04	Mundur
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,12	Mundur
17	Jasa Lainnya	-0,24	Mundur

Sumber: Hasil Analisis 2015

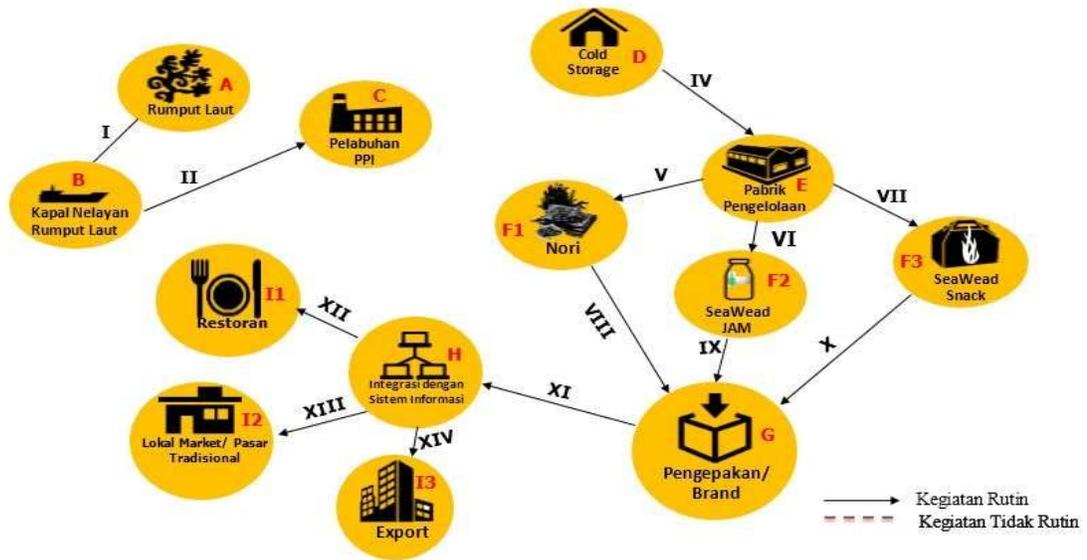
Gambar 1.
Sistem Pengelolaan Perikanan Tangkap



Sumber: Model Rumah dan Kawasan Pemukiman Nelayan, UGM (data diolah)

Gambar 2.

Sistem Pengelolaan Budidaya Rumput Laut



Sumber: Model Rumah dan Kawasan Pemukiman Nelayan, UGM (data diolah)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa.

1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai wilayah kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti perikanan tangkap dan budidaya rumput laut. Dilihat pada tahun 2014 bahwa sektor pertanian dan perikanan yakni; budidaya rumput laut basah sebesar 20.109,62, sedangkan budidaya rumput laut kering sebesar 2.513,70 Ton dan perikanan tangkap sebesar 8.708,26 Ton. Namun, jika dilihat dari perhitungan *Shift Share* bahwa potensi sektor ekonomi kelautan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini belum memiliki daya saing terhadap provinsi yang dikarenakan belum optimalnya dalam sistem pengelolaan maupun terintegrasinya sektor pertanian dan perikanan di wilayah ini.
2. Adapun, Jika dilihat dari perkembangan sektor ekonomi kelautan yang belum memiliki sistem pengelolaan dan terintegrasinya terhadap pulau-pulau kecil disekelilingnya, maka dibutuhkan keterkaitan terhadap sektor ekonomi kelautan dengan mengkaitkan sistem pengelolaannya dari hasil panen budidaya rumput laut dan perikanan tangkap hingga menjadi suatu produk jadi. maka disusunnya alur konektivitas untuk terintegrasinya

dalam pengelolaan hasil ekonomi kelautan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Daftar Pustaka

- Glasson, John. London 1974. "An Introduction to Regional Planning", Huchthinson and CoPublisher Ltd.
- Michael E Porter. 1994. "Competitive Strategy"
- Assoc. Prof.Dr. Ir. Budi Prayitno, M.Eng. 2015. Model Rumah dan Kawasan Pemukiman Nelayan.
- Aditianata, Universitas Indonesia Tesis 2014. "Mengurangi Ketimpangan Pembangunan di wilayah kepulauan dan daratan menuju pembangunan permukiman kepulauan mikro yang berkelanjutan (studi kasus: Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)"
- Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Provinsi Maluku Dalam Angka Tahun 2015. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015.
- www.bppk.kemenkeu.go.id 13 febuari 2015. "Poros Maritim dan perkembangan perekonomian Indonesia".

Saran

untuk mendukung sistem pengelolaan dan keterkaitan antar wilayah dari hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya Rumput Laut membutuhkan beberapa kriteria seperti:

- Masyarakat setempat diberi pembekalan Inovasi dari hasil Nelayan yang di dapat untuk dikelola menjadi produk jadi.
- Saling mengikat kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dan kerjasama terhadap MoU untuk meningkatkan lebih luas dari Potensi Laut yang dihasilkan.

- Membutuhkan lima *Cold Storage* untuk menampung hasil Budidaya Rumput Laut dalam satu tempat, yaitu di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- Membutuhkan sarana dan prasarana memadai yang dapat menunjang dalam kegiatan proses pengelolaan dan terintegrasinya hasil produk setengah jadi hingga menjadi produk jadi.

